

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berakhirnya Perang Dunia II membawa dampak kelumpuhan ekonomi di berbagai belahan dunia. Negara yang terlibat dalam perang maupun negara yang baru merdeka, terkena krisis ekonomi yang timbul seperti kebutuhan barang meningkat, ataupun jumlah penduduk yang berkurang yang berujung pada kurangnya sumber daya manusia. Untuk menstabilkan ekonomi negara, diperlukan upaya mendorong siklus ekonomi di pasar, dan salah satunya perdagangan dengan negara lain. Sebagai salah satu jembatan hubungan antar negara, perdagangan antar negara juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki oleh negara.

Amerika Serikat memperkenalkan strategi *Foreign Trade-Zone (FTZ)* tahun 1934 sebagai salah satu upaya mendorong perdagangan internasional dan *transshipment* ke negaranya. Dimulai di *Boston Harbour (Massachusetts, Amerika Serikat)*, strategi ini mulai popular pada tahun 1970-an dan diasopsi berbagai negara seperti Irlandia, China, India, Hong Kong, Singapura, Panama, Malaysia, Filipina, dan Republik Dominika. *FTZ* juga telah berkembang dalam beberapa dekade ini, dengan negara yang menggunakannya meningkat dari tahun 1980 sejumlah 132 kota dan berkembang hingga 3000 kota pada tahun 2006 (Ettore, 1998; ILO, 2007; Papadopoulos, 1987; WEPZA, 2007).

*FTZ* memiliki banyak nama, seperti *Export Processing Zones (EPZs)*, *Special Economic Zones (SEZs)*, *Freeports*, *Free Industrial Zones*, dan lainnya. Tidak ada istilah pasti mengenai *free trade zone*, menurut ILO, World Bank, dan WEPZA adalah tempat yang dibatasi secara geografis yang terletak di suatu negara, yang memberikan pengecualian bea impor dan ekspor, rezim pengaturan liberal, dan / atau pajak dan insentif lainnya, yang dimaksudkan untuk

menciptakan lingkungan yang relatif bebas penghalang yang mendorong bisnis untuk meningkatkan impor, ekspor dari, dan / atau manufaktur di wilayah zona.

Sejak diadopsi pada tahun 1970-an, 80 *FTZ* di 30 negara menghasilkan USD 6 miliar dari ekspor serta dapat mempekerjakan 1 juta tenaga kerja. Saat ini 3.000 *FTZ* telah berjalan di 120 negara dan membukukan transaksi lebih dari USD 600 miliar dalam ekspor dan menyerap 50 juta tenaga kerja langsung (World Bank, 2017). Dengan menawarkan kemudahan dalam perdagangan dan produksi untuk ekspor, *FTZ* berpotensi untuk menarik investasi, perdagangan valuta asing, tenaga kerja, serta meningkatkan teknologi dan infrastruktur.

Secara geografis, Selat Malaka yang merupakan persimpangan jalur antar benua memiliki nilai ekonomis lebih besar. Salah satu contohnya Negara Singapura yang kini merupakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi dunia, pada tahun 2014 memiliki pemasukan APBN sejumlah 445,172 miliar dolar singapura dengan 73% berasal dari jasa (pelabuhan dan re-ekspor barang). Ini memberi gambaran seberapa besar potensi yang dimiliki kawasan sekitar Selat Malaka. Indonesia memiliki gugusan pulau Batam-Bintan-Karimun yang langsung berbatasan dengan Negara Singapura, yang memberi peluang besar untuk memanfaatkan potensi.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) no. 46 – 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pemerintah menerapkan zona perdagangan bebas (*FTZ*) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagai upaya peningkatan ekonomi kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK). Konsep *FTZ* didasari pada kemudahan kegiatan ekspor-impor ke luar negeri, sembari kemudahan kegiatan industri yang ada di kawasan BBK. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah tidak terdapat nya Ppn dan pajak terhadap barang mewah.

Dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, kegiatan ekspor impor memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan ekonomi. *FTZ* menjadi salah satu

strategi dalam meningkatkan pendapatan wilayah, disatu sisi terdapat beberapa negara yang berhasil mempraktikannya seperti Senzhou, China yang kini menjadi pusat manufaktur dan perkapalan di wilayah selatan China. Namun ada daerah yang gagal menerapkannya seperti di Korea Utara. Batam yang menjadi satu dari dua wilayah *FTZ* di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan laju ekonomi dan kesejahteraan penduduk melalui lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Sebagai daerah yang didaulat menjadi kawasan *FTZ*, Batam memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan fasilitas dan insentif yang diberikan. Dengan terbatasnya penelitian mengenai *FTZ*, perlu diidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan *FTZ* terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam.

## 1.2 Perumusan Masalah

Peningkatan ekonomi kawasan merupakan hal yang penting, untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasannya. Ekonomi berkembang sesuai dengan kondisi geografis dan sumber daya yang tersedia, dan berbagai konsep yang diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi kawasan, *FTZ* dianggap mampu untuk meningkatkan potensi ekonomi kawasan dan memiliki peran penting dalam otonomi daerah. Kawasan *FTZ* kemudian menjadi tolak ukur kesejahteraan daerahnya.

Terlepas dari kondisi ideal yang diinginkan, dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari *FTZ* sendiri. Dalam praktiknya *FTZ* memberikan berbagai insentif yang dianggap memudahkan kegiatan ekspor impor, tetapi keberadaan insentif yang diberikan dari manfaat *FTZ* dinilai tidak mampu mengontrol harga barang yang beredar. Dari data tahun 2018, nilai impor Kota Batam lebih besar dibandingkan ekspor

yang memperlihatkan tidak tercapai nya *FTZ* menjadi tombak meningkatkan ekspor kawasan.

*FTZ* juga seharusnya dinilai mampu untuk meningkatkan ekonomi kawasan, namun sejak tahun 2011 industri pengolahan yang menjadi andalan *FTZ* Kota Batam menurun dari tahun ke tahun. Awalnya laju pertumbuhan industri pengolahan mencapai 7,36% per tahun dan terus menurun hingga tahun 2017 hanya 1,76% per tahun. Persentase penyumbang PDRB pun terus berkurang hingga 55,10% PDRB pada tahun 2017 dari 56,71% di tahun 2013 (Kota Batam dalam Angka, 2018).

Selain itu jumlah investor yang menjadi tulang punggung kawasan *FTZ* semakin berkurang tiap tahunnya. Pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan dengan tutupnya 62 perusahaan asing dan mengakibatkan kurang lebih 33.000 pegawainya di-PHK. Investor juga menilai *FTZ* Batam tidak memberikan dampak yang signifikan bagi mereka, dimana dengan kondisi kurangnya proyek dan upah yang tinggi. Salah satu upaya pemerintah mengatasinya dengan *Online Single Submission* (2018) untuk memudahkan prosedur investasi di Batam, yang membawa dampak kenaikan jumlah investor hingga 4% dari tahun sebelumnya. Namun dalam 6 bulan terakhir (Januari 2019- Juni 2019) sudah tutup 27 perusahaan diakibatkan kurangnya permintaan barang (Dinas Perindustrian Kota Batam, 2019).

Dari berbagai permasalahan yang timbul, diperlukannya kajian mengenai bagaimana kinerja dalam penerapan *FTZ* di Kota Batam, mengapa ekonomi kota menurun, dan pengaruh *FTZ* bagi pertumbuhan ekonomi wilayah kedepannya. Dari berbagai masalah tersebut didapat pertanyaan yang kemudian diangkat dalam penelitian ini, yaitu **bagaimana dampak kebijakan *FTZ* terhadap perkembangan ekonomi wilayah Kota Batam**

## 1.3 Tujuan dan Sasaran

### 1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi dampak **kebijakan free trade zone** terhadap **perkembangan ekonomi wilayah** dengan studi kasus Kota Batam.

### 1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran studi ini adalah:

1. Teridentifikasinya bentuk kebijakan hukum penerapan *FTZ* di Kota Batam
2. Teranalisisnya kinerja kawasan sebelum dan sesudah penerapan *FTZ* di Kota Batam

## 1.4 Lingkup Studi

### 1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Kawasan *Free Trade Zone* atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya Kawasan *FTZ* dalam penulisan ini akan disebut KPBPB) menurut UU no 36 Tahun 2000 ditetapkan di daerah Kota Batam dan pulau sekitarnya oleh PP no 46 Tahun 2007 dengan jangka waktu 70 tahun sejak ditetapkan. Penerapan *FTZ* sendiri secara resmi di *launching* pada 19 Januari 2009 berdasarkan PP no 2 Tahun 2009, sehingga dalam penelitian ini mengambil *timeline* tahun 2009-2019, dan terdapat perbandingan antara kondisi sebelum penerapan *FTZ* yaitu dari tahun 2006-2008 dan tahun setelah penerapan.

Ruang lingkup substansi memuat batasan-batasan substansi penelitian untuk menentukan lingkup studi. Lingkup substansi dalam penelitian berupa:

**Tabel 1.1 Tabel Variabel dan Indikator**

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Sumber
1	Mengidentifikasi bentuk kebijakan hukum penerapan FTZ di Kota Batam	1. Kebijakan/payung hukum penerapan FTZ	Peraturan yang menjadi dasar kebijakan: a. PP No. 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam b. UU No. 44 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam c. Keppres No.9 Tahun 2008 tentang DK Batam d. PP No.2 Tahun 2009 tentang Pajak dan Bea cukai e. Fasilitas dan insentif yang diberikan (terkait pajak, bea cukai, dan sistem administrasi)	Badan Pengusaha Kota Batam (BP Batam), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
			2. Kelembagaan	
		3. Hak dan Wewenang	a. Badan pelaksana kebijakan (peran dan fungsi)  Hak pengelolaan atas tanah Kota Batam	Badan Pengusaha Kota Batam  Badan Pengusaha Kota Batam (BP Batam), Pemerintah Kota Batam
2	Mengidentifikasi kinerja kawasan terhadap penerapan FTZ	1. Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdasarkan Hasil Kajian Indikator Kinerja Pengembangan KSN Bidang Ekonomi Indonesia oleh Bappenas 2008  2. Ekonomi	a. Ketersediaan dokumen pengembangan KPBPB dan payung hukum terkait bea masuk dan pelabuhan bebas	BAPPENAS, Badan Pengusaha Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Bea Cukai Kota Batam
			b. Persentasi realisasi penyediaan sarana prasarana kawasan industri dan pelabuhan bebas	
			c. Jumlah investasi PMA dan PMDN	
			d. Jumlah PDB sektor industri manufaktur dan logistic	
			e. Jumlah kontribusi ekspor-impor terhadap pajak kawasan	BPS, Batam dalam Angka, Arsyad

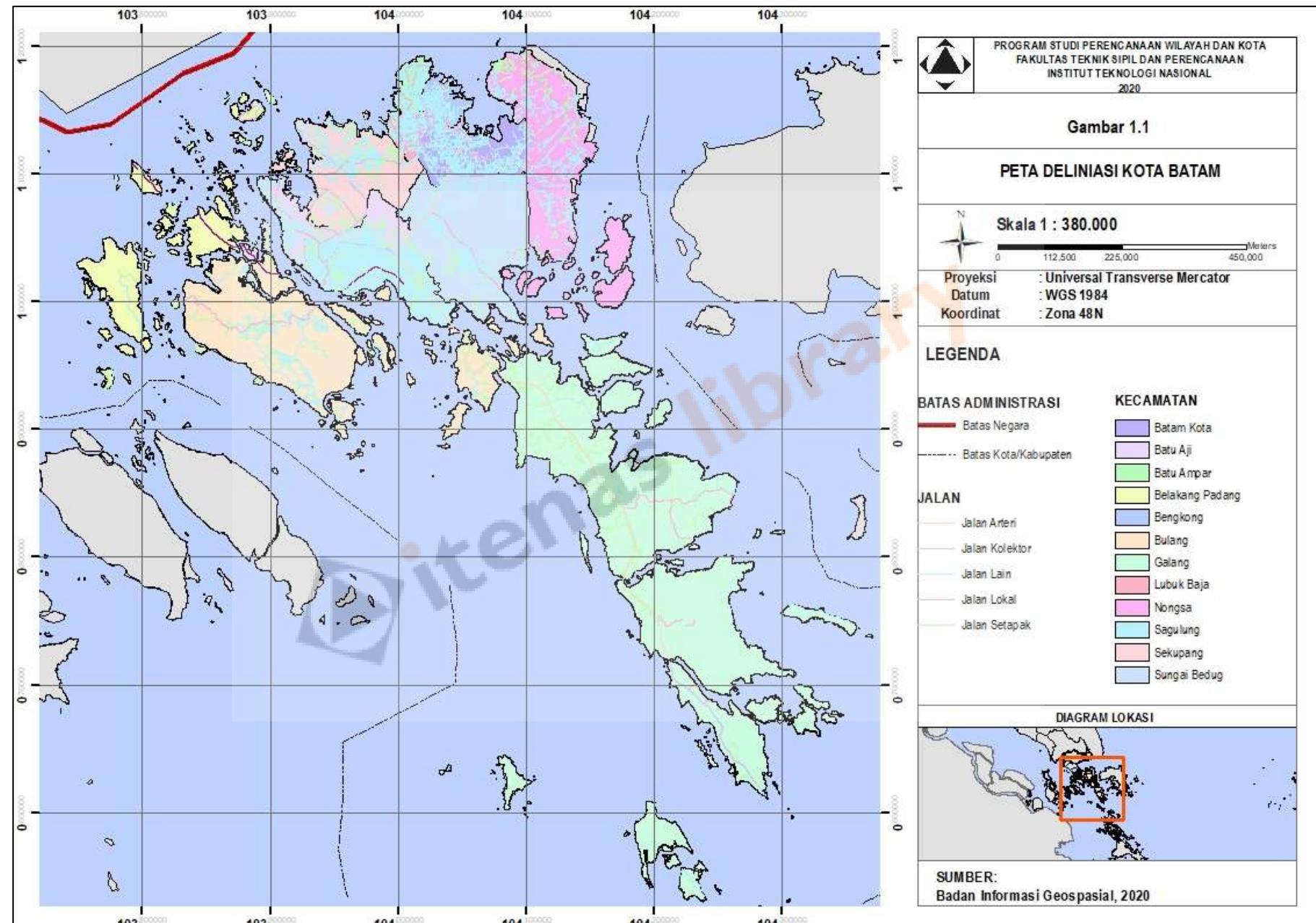
No	Sasaran	Variabel	Indikator	Sumber
		3. Penduduk	Indeks Pembangunan Manusia	(1999), UN-HABITAT (1996), Dirjen Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal BAPPENAS
		4. Kinerja Kawasan (berdasar UN-HABITAT)	City Development Index: 1. Persentase akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi, listrik, dan telepon 2. Jumlah hasil limbah dan sampah rumah tangga 3. Angka harapan hidup dan tingkat kematian bayi 4. PDRB Kota Batam	

Hasil Studi Literatur, 2019

### **1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Wilayah kajian studi merupakan Kota Batam dan sekitarnya yang berada di kawasan strategis jalur pelayaran internasional.KPBPB diterapkan di Kota Batammeliputi Pulau Batam,Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang,Pulau Galang dan Pulau Galang BaruLetak Kota Batam berada di  $0^{\circ} 25' 29''$  -  $1^{\circ} 15' 00''$  LU dan  $103^{\circ} 34' 35''$  -  $104^{\circ} 26' 04''$  BT dengan luas  $4.580\ Km^2$ (mengikuti kebijakan pusat), dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Timur : Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan laporan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan substansi, serta sistematika pembahasan.

### **BAB 2: TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini berisikan literatur yang menunjang studi dan studi terdahulu.

### **BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis penelitian

### **BAB 4: GAMBARAN UMUM KAWASAN BATAM**

Pada bab ini berisi gambaran umum berupa karakter fisik, kondisi demografi, kondisi perekonomian wilayah, dan penerapan KPBPP Batam

### **BAB 5: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FTZ TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BATAM**

Pada bab ini berisi analisis dampak penerapan kebijakan *free trade zone* yang terdiri dari analisis kebijakan *FTZ*, analisis pengaruh *FTZ* terhadap kinerja kawasan, dan analisis kinerja KPBPP Batam

### **BAB 6: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini berisi hasil kesimpulan analisis pada bab 5 dan rekomendasi

